

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN

Rima. M

**Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan Sebayan, Kab. Sambas,
Provinsi Kalimantan Barat
rima.ansyori@gmail.com**

Hasiah

**Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan Sebayan, Kab. Sambas,
Provinsi Kalimantan Barat
hasiahrasyida@gmail.com**

Azmi

**Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan Sebayan, Kab. Sambas,
Provinsi Kalimantan Barat
azmiarzan1@gmail.com**

Abstract

Increasing the status of the Village Building Index (IDM) of the Village is very dependent on the Village Fund. The better the management of the Village Fund, the Village IDM should increase. However, the facts on the ground are that there are still several villages that already have Village Funds but their IDM status is still developing. Based on the IDM, the status of village progress and independence is explained with a classification that is expected to facilitate an understanding of the current situation and condition of the village, as well as how policy steps must be developed to support the improvement of village life to become more advanced and independent.

Keywords: Management, Village Fund, Village Index Build.

Abstrak

Peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) Desa sangat bergantung pada Dana Desa. Semakin baik pengelolaan Dana Desa seharusnya IDM Desa meningkat. Namun, fakta di lapangan masih ada beberapa Desa yang sudah memiliki Dana Desa namun status IDM-nya masih berkembang. Berdasarkan IDM, status kemajuan dan kemandirian desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Indeks Desa Membangun.

PENDAHULUAN

Untuk mempercepat pembangunan, serta meningkatkan keterjangkauan dalam wilayah tertinggal pemerintah pusat melakukan suatu usaha untuk mengatasi hal tersebut melalui kebijakan Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang sumbernya berasal dari APBN, yang kemudian ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang nantinya bertujuan untuk mendanai berbagai kegiatan-kegiatan Desa seperti program pembangunan, pemberdayaan serta pemerintahan desa.¹

Hadirnya Dana Desa diharapkan setiap desa mampu meningkatkan status desanya menjadi desa yang mandiri dalam bidang ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan. Kemampuan dan keberhasilan desa dalam meningkatkan kemandiriannya dapat diukur melalui IDM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.² Oleh sebab itu, dengan adanya Dana Desa dinilai menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemerintah desa senagai upaya “desa membangun” sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang Undang Desa.

Hak dan kewajiban mengelola Dana Desa berupa pendapatan, belanja, pembiayaan perlu dilakukan tata keola keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.³ Tujuan Dana Desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan publik di Desa, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan. Secara tidak langsung dengan adanya Dana Desa bisa meningkatkan status Desa.

Status Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan

¹ A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Media Pustaka, 2014), hlm. 4.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun”, (2016).

³ Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016), hlm. 11.

berdasarkan Indeks Desa Membangun ini diklasifikasikan dalam 5 status Desa yakni:⁴ (1) Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada; (2) Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa PraSembada; (3) Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya; (4) Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa PraMadya; dan (5) Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.

Adanya klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM) bertujuan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, yakni mengentaskan 5000 Desa Tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.⁵ Untuk itu diperlukan kejelasan status kemajuan dan kemandirian Desa di seluruh Indonesia. Kejelasan status tersebut akan mempermudah para pemangku kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan terutama pemerintah dan masyarakat Desa itu sendiri, dalam mengelola pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan Desa tersebut.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa desa untuk maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi dan kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.⁶

Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam konteks dinamika desa, perubahan sosial, ekonomi dan ekologi desa yang terjadi tidaklah berdiri sendiri. Proses perubahan melibatkan banyak dimensi (multidimensi), tidak hanya desa sebagai “unit wilayah” tetapi juga keterkaitan antar desa, maupun pengaruh dari kluster yang lebih luas seperti kawasan, regional, nasional bahkan global.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Beni Haryanto Tambunan, Marlon Sihombing, R. Hamdani Harahap dengan judul “Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun”, (2016), Lihat Pasal 5 Ayat (1).

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019” (2015), Lihat Lampiran Buku I, hlm.5-11.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun”, (2016), Lihat Penjelasan pada Peraturan ini.

Serdang Provinsi Sumatera Utara”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dana Desa sangat mempengaruhi peningkatan status Indeks Desa Membangun. Dengan banyaknya dimensi dan indikator yang menjadi penunjang Indeks Desa Membangun membuat Dana Desa tidak bisa dianggarkan ke setiap dimensinya, dan pemerintah desa serta masyarakat harus memilih yang mana menjadi prioritas.⁷

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mohamad Sukarno, Analisis Pengembangan Potensi Desa Berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) (Studi Kasus: Desa Ponggok, Kecamatan Palohharjo, Kabupaten Klaten). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa adanya potensi desa yang dikembangkan mampu meningkatkan perekonomian dan kehidupan sosial desa. Dimana potensi desa dikembangkan menjadi desa wisata, dan dikunjungi banyak pengunjung sehingga perekonomian masyarakat setempat meningkat. Dengan demikian berdampak pada status Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Desa Mandiri.⁸

Penelitian Oki Oktaviana, Devi Triady Bachruddin, Upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah Provinsi Banten Melalui Intervensi Kebijakan Pemerintah Provinsi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun di wilayah Provinsi Banten yaitu dengan memberikan kewenangan pemerintah Provinsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 112 dan 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa, perlu melakukan intervensi kebijakan bagi Desa-Desa agar melahirkan inisiatif pembangunan sektor yang dapat meningkatkan capaian dimensi ekonomi dan lingkungan (IKE dan IKL). Selain itu, kewenangan juga diberikan kepada pemerintah Desa untuk berinisiatif memutuskan kegiatan dan anggaran pembangunan, atau pendapat lainnya yang menyebutkan bahwa kemandirian masyarakat Dan Desa ditujukan dengan terbentuknya efektifitas dan efisiensi pembiayaan pembangunan sesuai dengan kondisi dan keperluan Desa, membangkitkan kepercayaan dan tanggung jawab masyarakat dan Desa untuk berprakarsa memanfaatkan potensi Desa bagi pencapaian kesejahteraan.⁹

⁷ Beni Haryanto Tambunan, dkk, “Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utar”, Jurnal Perspektif, (2020): hlm. 45.

⁸ Mohamad Sukarno, “Analisis Pengembangan Potensi Desa Berbasis Indeks Membangun Desa (IDM) (Studi Kasus: Desa Ponggok, Kecamatan Palohharjo, Kabupaten Klaten)”, Prosiding Seminar Edusainstech 4 FMIPA UNIMUS 2020, hlm. 540.

⁹ Oki Oktaviana, Devi Triady Bachruddin, Upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah Provinsi Banten Melalui Intervensi Kebijakan Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), hlm. 9.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan terkait penelitian yang relevan dengan penelitian ini, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti kaji. Secara umum persamaannya pada fokus dalam meningkatkan status Indeks Desa Membangun (IDM). Namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan Dana Desa dalam kaitannya dengan peningkatan Indeks Desa Membangun.

Berdasarkan uraian di atas, melalui penelitian ini peneliti ingin menguraikan bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan IDM, serta faktor apa saja yang mempengaruhi status IDM Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM)

Berdasarkan Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020, bahwa tahapan pembangunan desa terdiri dari pendataan desa, perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pertanggungjawaban. Dalam penerapannya, Pemerintahan Desa melakukan tahapan pembangunan desa antara lain:

1. Tahap Pendataan Desa

Pada tahapan ini, seiring dengan adanya upaya pemerintah untuk mempercepat laju pencapaian SDGs Desa, sebelum dokumen perencanaan desa disusun, maka terlebih dahulu dilakukan pendataan desa yang berbasis SDGs Desa. Kepala Desa membentuk tim pendata yang dikenal dengan kelompok kerja (POKJA) pendataan yang terdiri dari unsur masyarakat, lembaga dan aparatur pemerintah desa untuk melakukan pendataan awal yang didanai dengan Dana Desa. Hasil data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID) yang akan dijadikan sebagai basis data perencanaan desa.

2. Perencanaan Pembangunan Desa

Tahapan perencanaan desa diawali musyawarah desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disebut RKP Desa. Dalam penyusunan RKP Desa, Pemerintah Desa melibatkan masyarakat yang difasilitasi oleh BPD dalam musyawarah desa. Pada proses musyawarah ini masyarakat mengusulkan beberapa rencana pembangunan berdasarkan skala prioritas pembangunan di desa.

Dokumen RKP Desa merupakan acuan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Desa). Dalam tahap ini Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dalam peraturan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan APB Desa.

Berdasarkan hasil analisa peneliti, dalam bidang-bidang tersebut terdapat beberapa prioritas pembangunan yang diarahkan untuk menjawab beberapa permasalahan di desa termasuk indikator-indikator IDM yang masih lemah, seperti pembentukan dan pengembangan BUM Desa, pembangunan dan pengembangan sarana prasarana ekonomi produksi, sarana prasarana dasar, pendidikan dan kesehatan.

3. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam tahap ini, Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Desa sejak Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan bersama BPD, Perangkat Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara swakelola dan padat karya tunai Desa dengan memaksimalkan swadaya dan gotong-royong masyarakat mulai dari keterlibatan sebagai tenaga kerja, penyedia barang maupun jasa. Sebelum pelaksanaan dimulai, Kepala Desa melakukan musyawarah pra-pelaksanaan bersama beberapa pihak.

4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap ini, setelah menerima laporan dari tim pelaksana kegiatan, Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dalam forum musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam forum tersebut, masyarakat diberi kesempatan untuk memberika tanggapan dan masukan-masukan maupun kritik dan saran kepada Pemerintah Desa atas laporan pertanggungjawaban yang dipaparkan oleh Kepala Desa.

Sebagaimana telaah yang telah dilakukan oleh Peneliti, proses tahapan awal dalam rangka pengelolaan Dana Desa terfokus pada pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sangat berkaitan erat dengan meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa yang diukur melalui IDM.

Secara umum, dalam konteks pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Segedong sudah sesuai dengan aturan yaitu Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan dana desa sangat berpengaruh pada peningkatan status IDM Desa. Namun jika dilihat dari kuantias dan kualitas ternyata belum mampu merubah status tingkat perkembangan desa. IDM adalah sebuah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. IDM menjadi prakarsa pemerintah dalam upaya mengukur

status perkembangan desa sebagai bahan menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan.

IDM dibuat untuk memperkuat pencapaian dalam rencana pembangunan jangka menengah, dimana IDM digunakan sebagai acuan dalam melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan dengan harapan untuk mewujudkan kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil, dan mandiri. Hasil IDM yang mulai diidentifikasi tahun 2015, menjadi tolak ukur perkembangan pembangunan di desa Segedong selama ini.

Meskipun dengan adanya Dana Desa yang digulirkan Pemerintah Pusat sangat mendukung Desa Segedong, baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa namun sangat dipengaruhi oleh pola pengelolaan dana yang baik. Dengan jumlah dana desa sejak 2019-2021 statusnya sampai saat ini masih sebagai Desa berkembang. Maka hal ini perlu didukung oleh pengelolaan Dana Desa.

B. Faktor yang Mempengaruhi Status Indeks Desa Membangun (IDM) Desa

1. Faktor Pendukung

Secara umum, faktor-faktor pendukung dalam peningkatan status IDM di Desa antara lain:

a. Letak Geografis Desa

Secara geografis jika lokasi Desa terletak di jalur yang mudah diakses, dilewati oleh ruang jalan Provisi dan terletak tidak jauh dari ibukota Kecamatan Tebas dapat menjadi salah satu pendukung dalam percepatan perubahan status Desa. Dengan demikian, sama sekali tidak ada kesulitan untuk akses jalan menuju desa, baik untuk pengangkutan bahan atau material maupun untuk akses perekonomian masyarakat.

b. Adanya Pendampingan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan Dana Desa, Desa Segedong selalu mendapatkan pendampingan baik dari pihak pemerintah kabupaten, kecamatan maupun dari tenaga pendamping profesional yang terdiri dari Pendamping Desa dan Pendamping Loka Desa yang selalu aktif mendampingi dan membantu pemerintah desa.

c. Keuangan Desa

Untuk mendukung pembangunan di desa, Pemerintah Desa Segedong sudah memiliki sumber pendapatan yang terdiri dari Dana Desa dari APBN, Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan pendapatan lain yang sah. Pada tahun 2021 total jumlah pendapatan Desa Segedong adalah sebesar Rp 1.108.896.000,-. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka tidak menutup kemungkinan status IDM desa akan membaik juga.

2. Faktor Penghambat

Upaya meningkatkan status IDM, Pemerintah Desa Segedong telah melakukan beberapa langkah. Namun sampai dengan tahun 2021 status desa Segedong masih tetap berkembang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan status IDM Desa Segedong, diantaranya:

a. Faktor Prioritas Penggunaan Dana Desa

Indikator untuk meningkatkan IDM sangat banyak. Namun dengan jumlah dana desa yang digulirkan pemerintah Pusat ke Desa Segedong ditambah aturan atas Prioritas Penggunaan Dana Desanya sangat tidak memungkinkan Pemerintah desa dalam menganggarkan kegiatan yang merupakan kelemahan desa dalam Indikator dalam IDM. Saat ini, pembangunan di Desa Segedong masih terfokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan akses jalan dan jembatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pembangunan tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit karena masih banyak ruas jalan yang belum memadai sehingga dari tahun ke tahun pembangunan belum juga tuntas. Sementara indikator IDM memiliki banyak sektor yang harus ditingkatkan, sehingga banyak yang belum tersentuh oleh Dana Desa. Oleh karenanya beberapa indikator yang masih lemah dalam kuisisioner IDM belum terselesaikan meskipun pengelolaan Dana Desa sudah perlahan mengikuti ketentuan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang setiap berubah-ubah dari Kementerian Desa tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Program pembangunan yang di rencanakan oleh Desa bersama masyarakat Desa Segedong belum semua menyentuh indikator-indikator IDM. Pada saat musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan, masyarakat masih mengutamakan pembangunan fisik saja, sementara pembangunan non fisik terkadang kurang diprioritaskan. Padahal pengukuran IDM yang dilakukan setiap tahun bukan hanya berbicara fisik saja, tapi pembangunan non fisik seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Pendamping Desa saat diwawancari, bahwa dalam setiap musyawarah-musyawarah telah disampaikan dan disosialisasikan kepada pemerintahan desa dan masyarakat desa Segedong untuk memperhatikan indikator-indikator yang lemah dalam menentukan arah pembangunan desa.

Hal ini disebabkan oleh rendahnya SDM yang ada baik di masyarakat maupun di internal penyelenggara pemerintah desa yang terkadang tidak begitu menghiraukan hal tersebut, yang penting bagi mereka adalah ada kegiatan pembangunan yang masuk di wilayah dan lingkungannya. Perlu

komitmen dari pemerintah setempat mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan.

c. Faktor Kebijakan

Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan Dana Desa yang diterima oleh desa setiap tahunnya. Penetapan besaran Dana Desa sudah diatur dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati. Disamping itu adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait refocusing dana desa untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di desa yang mengakibatkan banyak dana terpangkas dan kegiatan yang sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tata Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2021.

d. Faktor Pola Fikir (*Mindset*)

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi IDM di Desa Segedong adalah masyarakat masih beranggapan bahwa Dana Desa hanya untuk pembangunan fisik saja. Sementara regulasi tentang program pembangunan dan pemberdayaan yang didanai dengan Dana Desa sudah ada.

Pada saat musyawarah desa untuk merencanakan program kegiatan pembangunan, pemerintah desa bersama BPD tidak berpedoman kepada analisa dan laporan hasil pengukuran IDM tahun-tahun sebelumnya. Terkadang raport IDM yang sudah ada setiap tahunnya tidak begitu diperhatikan dan bukan menjadi indikator penting dalam meningkatkan daya saing.

Jika ditinjau dari tujuan IDM, pemerintah pusat berupaya mewujudkan kondisi masyarakat desa adil, sejahtera dan mandiri. Melalui ukuran pengklasifikasian desa tersebut, setidaknya Pemerintah Desa Segedong berupaya meningkatkan status desa berkembang minimal menjadi maju atau sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah setempat tetap berkomitmen mengembangkan desa dalam konsep pembangunan berkelanjutan.

PENUTUP

Pengelolaan Dana Desa telah berorientasi pada 3 indikator standar IDM, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Namun pada hakikatnya upaya meningkatkan IDM melalui pengelolaan Dana Desa baik tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belum mampu meningkatkan Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Faktor pendukung yang dapat mempengaruhi peningkatan status IDM Desa

adalah letak geografis desa, adanya pendampingan dari berbagai pihak dan ketersediaan keuangan desa, sedangkan faktor yang menghambat peningkatan status IDM di Desa adalah Faktor prioritas penggunaan Dana Desa, SDM, kebijakan, dan pola pikir masyarakat (mindset). Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab kelemahan dalam mengelola potensi 3 (tiga) indikator menjadi poin utama meningkatkan status IDM di Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, 2009. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan Kelima.
- Azzuhaili, Wahbah, 1962. Tafsir al-Munir. Damaskus: Darul Fikri.
- Burhanuddin, 2003. Manajemen Pendidikan. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Hafidudin, Didin, 2008. Manajemen Syariat Dalam Praktek. Jakarta: Gema Islam.
- Irawan, Nata, 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ishaq al-Sheikh Bin Abdurahman Abdullah Bin Muhammad Bin, 2004. Tafsir Ibnu Kasir. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Puspawjaya, Andrian, Julia Dwi Naritha, 2016. Pengelolaan Keuangan Desa. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press.
- Sarman, Mohammad Taufik Makarao, 2011. Hukum pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2016. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.
- Terry, George R. 2013. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Usman, Saini. 2006. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- si Sumatera Utara”, *Jurnal Perspektif*, Februari.
- Oktaviana, Oki, Devi Triady Bachruddin, “Upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah Provinsi Banten Melalui Intervensi Kebijakan Pemerintah Tambunan, Beni Haryanto, dkk, 2020 “Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang ProvinProvinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)”.
- Sujana, Edy dkk, 2020. “Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Indeks Desa Membangun Sebagai Basis Data Rencana Pembangunan Desa Wanagiri”, *Proceding Senadimas Undiksha*.

Sukarno, Mohamad, 2020, “Analisis Pengembangan Potensi Desa Berbasis Indeks Membangun Desa (IDM) (Studi Kasus: Desa Ponggok, Kecamatan Palohharjo, Kabupaten Klaten)”, *Prosiding Seminar Edusainstech 4 FMIPA UNIMUS*.